Dengan berlakunya MEA, SDM pariwisata Indonesia akan menghadapi tantangan berat karena tidak siap dan terbatasnya jumlah tenaga professional bersertifikat resmi.

NUGROHO B. SUKAMDANI
Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid Jakarta

Sinergi Membangun SDM Pariwisata

Industri pariwisata telah berkembang sangat pesat. Di Indonesia pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan Indonesia yang mempunyai prospek cerah dengan tren yang terus meningkat dalam menambah devisa negara. Pada 2016 pemerintah menargetkan 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan 260 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) dengan kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional sebesar 5%, serta jumlah lapangan kerja yang diciptakan 11,7 juta tenaga kerja.

Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan target pariwisata naik dua kali lipat pada 2019, yakni kunjungan wisman 20 juta dan pergerakan wisnus 275 juta dengan memberikan kontribusi pada PDB nasional 8% dan devisa yang dihasilkan Rp280 triliun, serta menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata 13 juta orang.

Akan tetapi, prospek pengembangan di sektor pariwisata ini dinilai sangat kompleks terutama setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2016. Dengan berlakunya MEA, SDM pariwisata Indonesia akan menghadapi tantangan berat karena tidak siap dan masih terbatasnya jumlah tenaga professional pariwisata yang memiliki sertifikasi resmi dan masih lemahnya penguasaan bahasa asing. Daya saing SDM pariwisata Indonesia sangat rendah yaitu masih di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina.

Dalam bidang pariwisata juga telah dilakukan pengaturan saling pengakuan dan kesepakatan penyusunan Asean Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals (Asean MRA-TP) kompetensi SDM pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Menteri Pariwisata Ariel Yahya menegaskan perlunya sinergi peran serta semua pemangku kepentingan dengan skema Pentahelix antara kalangan pemerintah, akademisi, pelaku bisnis, media dan praktisi maupun komunitas pariwisata sebagai upaya untuk mempersiapkan sdm pariwisata yang berkualitas dan unggul.

Dalam sinergi antar lembaga ini, bukan hanya pemerintah pusat saja yang harus bertanggungjawab, pemerintah daerah pun dituntut harus membantu dalam menyiapkan SDM pariwisata. Terutama untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan bidang pariwisata di daerah yang bersangkutan, selain itu juga agar dapat bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di kota daerah atau negara lain.

KEMITRAAN

Salah satu contoh kemitraan untuk meningkatkan kualitas SDM pariwisata telah dilakukan oleh Pemkot Payakumbuh dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Sahid Jakarta melalui pendidikan kepariwisataan Kota Payakumbuh, Sumatra Barat. Pihak STP Sahid akan memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan di sertifikat yang diakui seluruh hotel berbintang di negara-negara Asean, (2) bagi lulusan program D4 di STP Sahid, terutama yang punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik, berpeluang besar disalurkan bekerja di Jepang, Korea, Mekah dan Jeddah Saudi Arabia, dan (3) pemberian program beasiswa pendidikan dan pelatihan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan SDM bidang pariwisata.

Dalam kerja sama ini, masing-masing pihak memiliki peran penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Beberapa langkah sinergi atau kerja sama antara Pemkot Payakumbuh dengan STP Sahid Jakarta, di antaranya, STP Sahid memberlakukan program akademik dan penyelenggaraan pendidikan dengan tujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas, mandiri, dan berdaya saing dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta memperhatikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sinergi kerja sama lain yang dilakukan oleh Yayasan Sahid Jaya dalam pengembangan SDM pariwisata yang berkualitas adalah dengan mendirikan Center for Tourism Education (CTE) Lagoi – Bintan. CTE memiliki dua divisi pendidikan yaitu Sahid Bintan Tourism Institute (SBTI)—yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pariwisata dan perhotelan, dan International Education (IEB) Bintan. Sistem pendidikan di IEB diselenggarakan dengan kerjasama dengan Business and Technology Education Council (BTEC) Inggris.

Penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan dan perhotelan CTE mengacu pada sistem kompetensi dan kurikulum KKNI dengan lulusan dari CTE memiliki sertifikasi BNSP.

CTE terus mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikannya untuk menghasilkan lulusan yang profesional yang memiliki kompetensi keterampilan dan keahlian yang berdaya saing internasional di bidangnya sehingga mudah diterima di industri perhotelan dan kepariwisataan baik lokal, nasional, maupun internasional serta memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi.

Dari contoh di atas terlihat bahwa sinergi kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan swasta untuk